

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu paradoks pembangunan yang paling banyak didiskusikan dalam literatur ekonomi pembangunan adalah fenomena *resource curse* atau kutukan sumber daya alam. Fenomena ini merujuk pada kondisi di mana suatu daerah atau negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru mengalami kinerja pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah yang minim sumber daya alam (*Institute for Essential Services Reforms*, 2012). Dalam banyak kasus, kelimpahan sumber daya alam tidak serta merta menciptakan kemakmuran, melainkan justru memunculkan berbagai persoalan struktural yang menghambat proses pembangunan jangka panjang (Ridena et al., 2021).

Fenomena ini mendapat perhatian yang semakin luas ketika sejumlah daerah berkembang yang kaya sumber daya alam, khususnya mineral dan pertambangan, justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah yang relatif miskin sumber daya alam (Alssadek & Benhin, 2023). Paradoks ini kemudian menjadi fokus kajian yang luas dalam ekonomi pembangunan, mengingat implikasinya yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Wahyudi & Palupi, 2023).

Secara teoritis, konsep *resource curse* pertama kali diperkenalkan oleh Auty (1993) yang menjelaskan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor sumber daya alam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui berbagai mekanisme, seperti lemahnya diversifikasi ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kerentanan terhadap konflik dan ketimpangan sosial. Sachs & Warner (2001) kemudian memperkuat argumen ini secara empiris dengan menunjukkan bahwa negara-negara dengan ketergantungan ekspor sumber daya alam yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dalam jangka panjang. Zuada et al. (2021) menjelaskan bahwa kelimpahan sumber daya alam sering kali tidak diikuti oleh kualitas institusi dan tata kelola yang baik, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

Secara teori, kekayaan sumber daya alam yang dikelola secara optimal seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui penciptaan nilai tambah ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Rahma et al., 2021). Namun, apabila pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung hanya terpusat pada sektor tertentu dan tidak mampu mendorong pembangunan manusia secara merata (R. Amalia, 2023). Kondisi ini diperkuat oleh temuan Anwar et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan berpengaruh negatif terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran di daerah pertambangan di Indonesia.

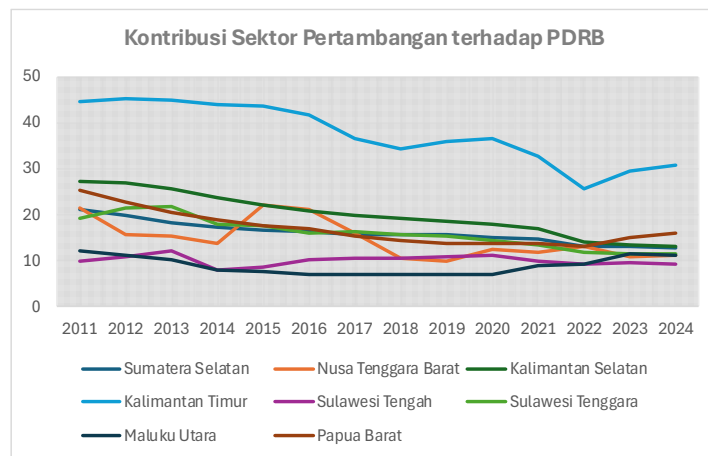
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam, sehingga sektor pertambangan menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertambangan menjadi salah satu dari lima lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini tidak lepas dari perannya yang cukup besar, yaitu menyumbang kontribusi sebesar 9,15% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Oleh karena itu, sektor pertambangan sering dipandang sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah penghasil sumber daya alam (Aida, 2024).

Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi yang besar terhadap struktur ekonomi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia. Karakteristik industri pertambangan yang bersifat padat modal (*capital intensive*) menyebabkan manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya tersalurkan kepada masyarakat secara luas, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat berlangsung relatif lambat (Rahma et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kinerja ekonomi makro yang ditopang oleh sektor pertambangan dengan kualitas pembangunan manusia yang dihasilkan.

Ketidakseimbangan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia dan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari pendapatan asli daerah (PAD) menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

yang berimplikasi langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nizar & Arif, 2023). Oleh karena itu, meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, peningkatan pembangunan manusia tetap bergantung pada kualitas SDM dan kemampuan fiskal daerah dalam mengelola serta menyalurkan manfaat ekonomi tersebut.

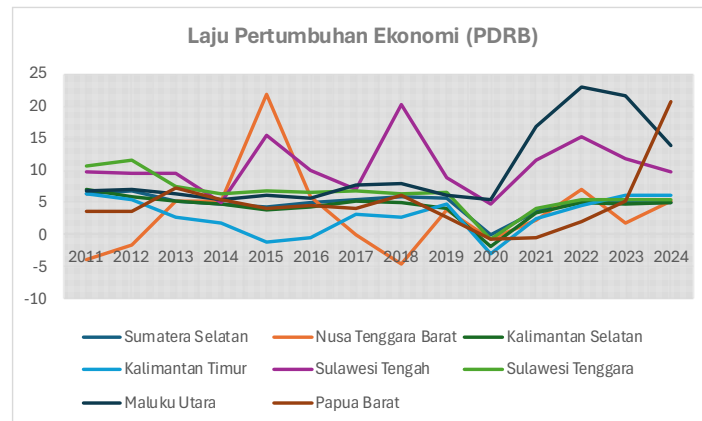
Fenomena ketergantungan terhadap sektor tambang dapat dilihat secara nyata pada beberapa provinsi penghasil tambang di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di delapan provinsi masih tergolong tinggi selama periode 2011-2024. Pada tahun 2024, provinsi Kalimantan Timur mencatat kontribusi sektor pertambangan terbesar, yaitu sebesar 30,92 persen. Selanjutnya, Papua Barat mencatat kontribusi sebesar 15,91 persen, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 15,40 persen dan Sumatera Selatan sebesar 12,87 persen. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi sektor unggulan dan memiliki peran dominan dalam struktur perekonomian di provinsi tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketergantungan ekonomi yang relatif besar terhadap aktivitas pertambangan sebagai sumber utama pembentukan nilai tambah regional.



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB tahun 2011-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (diolah)

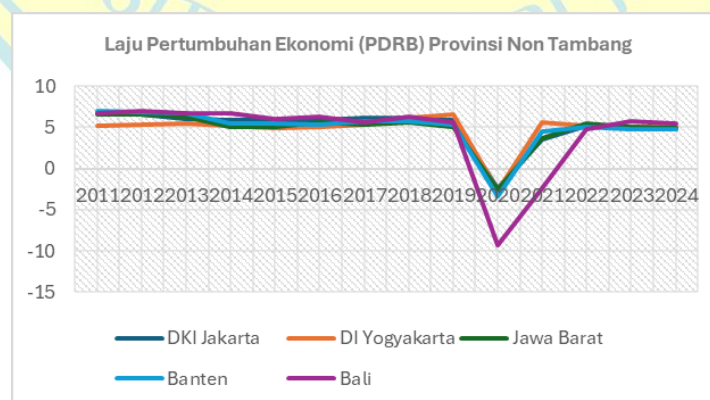
Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah tersebut menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada grafik yang ditunjukkan dalam Gambar 1.2, beberapa provinsi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Sumatera Selatan misalnya, mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari 5,24 persen pada tahun 2022 menjadi 5,03 persen pada tahun 2024. Pola serupa juga terlihat di Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan dari 15,22 persen pada tahun 2022 menjadi 9,89 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, Papua Barat justru mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 20,80 persen pada tahun 2024, sementara Nusa Tenggara Barat meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2024). Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini mencerminkan rentannya perekonomian daerah yang sangat bergantung pada satu sektor dominan (R. Amalia, 2023).



Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tahun 2011-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (diolah)

Sebagai perbandingan, provinsi yang tidak menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor unggulan memperlihatkan pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan Gambar 1.3, beberapa provinsi nonpertambangan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama periode 2011-2024. Meskipun seluruh provinsi tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi kembali pulih pada periode berikutnya dan cenderung berada pada tingkat yang stabil.

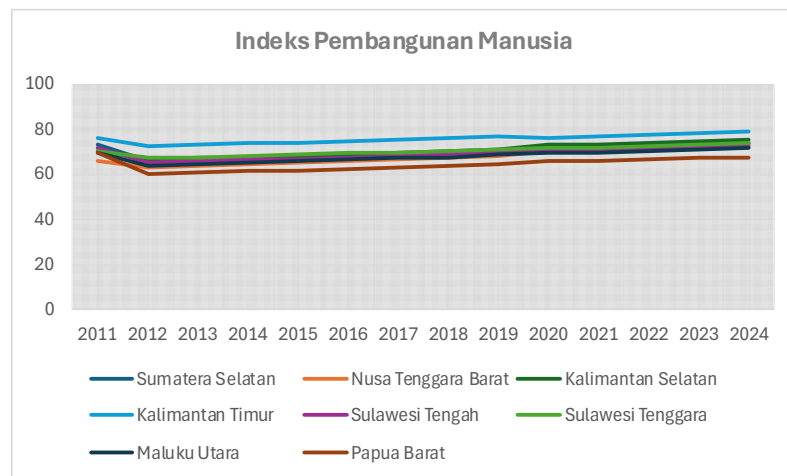


Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Provinsi Non Tambang

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (diolah)

Sebaliknya, provinsi penghasil tambang menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bahkan setelah masa pandemi berakhir. Perbedaan ini mencerminkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan cenderung lebih rentan terhadap perubahan harga komoditas serta dinamika pasar global, sehingga pertumbuhannya menjadi kurang stabil dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal agar manfaat sektor pertambangan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tingginya kontribusi sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4, terdapat perbedaan capaian IPM yang cukup mencolok antarprovinsi penghasil tambang. Pada tahun 2024, Kalimantan Timur mencatat IPM tertinggi sebesar 78,79, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 75,19. Sebaliknya, Papua Barat memiliki capaian IPM terendah sebesar 67,69. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daerah dengan kontribusi pertambangan yang besar belum tentu memiliki tingkat pembangunan manusia yang setara, artinya tingginya aktivitas ekonomi pertambangan tidak otomatis menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (diolah)

Jika dilihat secara tren, peningkatan IPM di delapan provinsi tersebut cenderung berlangsung secara bertahap dan tidak mengalami lonjakan signifikan seperti pertumbuhan ekonominya. Secara rata-rata, nilai IPM selama periode tahun 2011-2024 berada dalam kategori sedang hingga tinggi, namun masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi. Menariknya, beberapa provinsi dengan kontribusi sektor pertambangan yang relatif tinggi justru memiliki capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan provinsi penghasil tambang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia yang merata (Rahma et al., 2021; Ridena et al., 2021).

Penelitian mengenai sektor pertambangan dan fenomena *resource curse* di Indonesia maupun di tingkat internasional masih menunjukkan hasil yang beragam. Ridena et al. (2021) menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2012-2018 dengan metode GMM dan menemukan bahwa Indonesia berpotensi

mengalami *resource curse*, di mana kelimpahan sumber daya alam berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Senada dengan itu, Wahyudi & Palupi (2023) dalam penelitian yang berjudul "*Natural Resources Curse di Indonesia*" yang diterbitkan di *International Journal of Energy Economics and Policy* menemukan bahwa sumber daya alam berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Di tingkat internasional, Alssadek & Benhin (2023) dalam kajian komparatif yang dipublikasikan dalam jurnal *Resources Policy* juga mengkonfirmasi bahwa ketergantungan pada sumber daya alam cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi, dengan dampak yang bervariasi tergantung pada kualitas institusi dan jenis sumber daya alam yang dimiliki.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang berlawanan. Hermawan (2014) menemukan bahwa sektor pertambangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga menunjukkan adanya gejala *resource curse*. Namun, Aida (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan menemukan bahwa kontribusi sektor pertambangan justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM, sehingga tidak ditemukan adanya fenomena *resource curse*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa celah empiris yang perlu diperhatikan. Pertama, hasil penelitian mengenai pengaruh sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia masih belum konsisten, sebagian menemukan pengaruh negatif yang mengarah pada *resource curse*, sedangkan sebagian lain menunjukkan pengaruh yang positif (Alssadek & Benhin, 2023; F. Amalia & Emalia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah dan tidak selalu dapat digeneralisasi. Kedua, penelitian sebelumnya di Indonesia umumnya masih terbatas pada satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dengan periode waktu yang relatif pendek, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi daerah pertambangan secara lintas provinsi dan dalam jangka panjang. Ketiga, masih sedikit penelitian yang secara bersamaan memasukkan kontribusi sektor pertambangan dan kapasitas fiskal daerah yang diwakili oleh PAD dalam satu kerangka analisis untuk melihat pengaruhnya pembangunan manusia.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir dengan beberapa kebaruan. Pertama, penelitian ini menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu delapan provinsi dengan kontribusi pertambangan tinggi. Kedua, penelitian ini menggunakan data panel selama 14 tahun, yaitu 2011-2024 sehingga dapat melihat dinamika fenomena *resource curse* dalam jangka panjang. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan variabel kontribusi sektor pertambangan dan kapasitas fiskal yang dicerminkan melalui PAD dalam satu model analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di daerah pertambangan. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan temuan dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pembangunan Manusia pada daerah pertambangan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Pembangunan Manusia pada daerah pertambangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pembangunan Manusia pada daerah pertambangan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh PAD terhadap Pembangunan Manusia pada daerah pertambangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan dan dapat memberikan pemahaman terkait hubungan antara sektor pertambangan, PAD, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur empiris terkait fenomena *resource curse*, terutama dalam konteks daerah pertambangan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengevaluasi pengelolaan sektor pertambangan serta merumuskan kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- b) Sebagai masukan bagi Pemangku Kepentingan Sektor Pertambangan untuk mendorong praktik pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c) Sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan fenomena *resource curse* di Indonesia dengan cakupan wilayah dan periode yang lebih luas.

